

Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Bengkulu

Handoko Hadiyanto
Dosen Fakultas Ekonomi UNIB

ABSTRACT

The study evaluated the effectively of the Hotel and Restaurant of the tax of receive in the Bengkulu City. Hotel and Restaurant using tax object was unit analysis. Secondary data from Dinas Pendapatan Daerah office were analyzed using descriptive and explanatory research method. Perceive of the tax of the Hotel and restaurant was not effectively in the Bengkulu city. During the budget in period 1992/93 to 2001/02, tax receive of the hotel and restaurant was fluctuate. The higher of the tax period of receive were can be show on the period 1992/93, 1993/94, 1994/95, and 1999/00. Hence, in the 10 years (1992/93 – 2001/02) just only 4 years they were higher effectively of the tax receive level in the Bengkulu City.

PENDAHULUAN

Sumber utama dana pembangunan di Indonesia adalah pajak, pemungutan pajak yang dilakukan selama ini digolongkan menjadi 3 tingkatan yaitu Pajak Pusat, Pajak Daerah Tk.I dan, Pajak Daerah Tk.II. Pajak daerah merupakan wewenang daerah yang bersangkutan dan obyeknya harus diluar pajak pusat agar tidak terjadi pemungutan ganda pada obyek yang sama. Dengan keluarnya Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 1999 pemasukan terbesar bagi pemerintah daerah adalah pajak daerah, sebagaimana yang dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang RI No.22 Tahun 1999 Pasal 8 ayat 1 dan 2 berbunyi:

- 1). Untuk menyelenggarakan Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan

menggal sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara propinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistim Pemerintahan Daerah.

- 2). Dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi kewenangan daerah. Dari kedua ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa untuk memperoleh keuangan daerah diperlukan kewenangan dan kemampuan menggal sumber keuangan sendiri dan sepenuhnya berada ditangan daerah itu sendiri.

Pajak Hotel dan Restoran merupakan jenis pajak yang merupakan andalan Pemda Tingkat II. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 1998 tentang

pemungutan pajak Hotel dan Restoran dan retribusi ijin membangun hotel dan restoran. Besarnya tarif pajak Hotel dan Restoran telah ditetapkan sebesar 10%. Dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak Pembangunan I diubah menjadi Pajak Hotel dan Restoran. Pajak Hotel dan Restoran merupakan jenis pajak daerah yang cocok untuk dikembangkan, karena hotel dan restoran berkaitan langsung dengan sektor pariwisata. Walaupun kota Bengkulu bukan merupakan daerah tujuan wisata seperti Bali ataupun Yogyakarta tetapi sektor pariwisata disini mempunyai peranan yang besar dalam perkembangan perekonomian gambarkan usaha-usaha yang ingin dilakukan agar penerimaan Pajak Hotel dan restoran dapat dikelola secara efektif sesuai dengan apa yang diharapkan oleh petugas pajak dan wajib pajak. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Studi kepustakaan antara lain buku dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan tujuan penelitian dan Dokumentasi antara lain bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh Dispenda dan BPS. Alat analisa yang digunakan adalah dengan analisis efektivitas. Efektivitas merupakan hubungan antara penerimaan dengan target pajak hotel dan restoran. Dari sisi ini dapat digambarkan besarnya realisasi penerimaan sesuai dengan

daerah. Penerimaan pajak Hotel dan restoran meningkat tajam pada tahun 1999/2000 hal ini terlihat dari besarnya penerimaan Rp. 299.258.887,- dengan pencapaian target sebesar 101,89% (over target) Over target ini diharapkan akan terus berlanjut mengingat terdapat banyak obyek Pajak Hotel dan restoran di kota Bengkulu.

TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak Hotel dan restoran periode 1992/93 – 2001/02 di kota Bengkulu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian penjelasan (Explanatory Research). Penelitian ini mengtarget pajak hotel dan restoran. Rumus efektivitas adalah sbb:

$$\text{Efektivitas PH\&R} = \frac{\text{Realisasi PH\&R}}{\text{Target PH\&R}} \times 100\%$$

Apabila hasil perhitungan menghasilkan angka di atas 100%, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Penerimaan pajak hotel dan restoran telah sesuai dan dilaksanakan secara efektif (Rochmat Soemitro, 1984).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Bengkulu

$$\text{Efektivitas PH\&R} = \frac{\text{Realisasi PH\&R}}{\text{Target PH\&R}} \times 100\%$$

Tabel 1 Efektivitas Pajak Hotel Dan Restoran di Kota Bengkulu

Tahun	Realisasi PH&R	Target PH&R	Efektivitas (%)
1992/1993	55.178.877,00	55.000.000,00	100,32
1993/1994	133.045.336,00	100.000.000,00	133,04
1994/1995	144.994.890,00	125.000.000,00	116,00
1995/1996	151.537.300,00	155.000.000,00	97,77
1996/1997	149.410.429,00	155.000.000,00	96,39
1997/1998	153.621.555,00	300.000.000,00	51,21
1998/1999	189.271.988,00	200.000.000,00	94,64
1999/2000	229.258.887,00	225.000.000,00	101,89
2000/2001	186.704.804,00	290.000.000,00	64,38
2001/2002	221.951.884,00	290.000.000,00	76,54

Sumber : Data diolah

Dari tabel 1 dapat dilihat efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran di kota Bengkulu selama tahun anggaran 1992/1993 sampai 2001/2002 berkisar antara 51,21% – 133,04%. Tahun anggaran 1992/1993 sampai 1994/1995 dan tahun anggaran 1999/2000 merupakan tahun dimana penerimaan pajak hotel dan restoran di kota Bengkulu telah dilaksanakan secara efektif yaitu secara berurutan 100,32%, 133,04%, 116,00% dan 101,89%. Secara umum fenomena diatas atau disebut juga Over Target, menunjukkan kondisi ekonomi yang relatif masih stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Pada akhir era orde baru tingkat inflasi relatif rendah dan tingkat pengangguran tidak terlalu banyak. Dengan kondisi perekonomian yang stabil ini masyarakat cukup menabung dan mempunyai daya beli yang cukup tinggi sehingga mampu membayar sewa hotel dan

restoran sebagai bagian dari sisi kehidupan masyarakat. Untuk tahun anggaran 1999/2000 terjadinya over target disebabkan karena adanya Gempa Bumi pada tanggal 4 Mei 2000 di Bengkulu. Kejadian ini menyebabkan banyak pengunjung dari luar kota Bengkulu untuk melihat maupun memberikan bantuan secara langsung. Hal tersebut menyebabkan kenaikan tingkat hunian hotel dan naiknya pendapatan restoran di kota Bengkulu pada tahun anggaran 1999/2000. Kondisi perekonomian yang relative memburuk pada tahun 2000/2001 dan 2001/2002 menyebabkan penerimaan pajak hotel dan restoran tidak efektif dengan perolehan hasil kurang dari 100%. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik, telepon dan BBM yang diikuti dengan naiknya harga bahan pokok lainnya. Selain faktor ekonomi diatas juga disebabkan masih kurangnya kesadaran wajib pajak (hotel dan

restoran) dalam memenuhi kewajibannya. Pada tahun 1997/1998 terlihat penerimaan pajak hotel dan restoran menunjukkan angka yang paling rendah 51,21% selama periode 10 tahun terakhir. Hal ini disebabkan perekonomian Indonesia sedang mengalami krisis moneter, politik dan keamanan. Pada tahun anggaran tersebut secara makro tingkat inflasi sangat tinggi dan tingkat pengangguran meningkat tajam. Nilai rupiah jatuh terpuruk pada titik terendah, sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dollar jatuh pada titik terendah, sampai mencapai 1 US \$ = Rp.16.000,-

Secara keseluruhan dari tabel diatas dapat juga dilihat bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah nilai efektivitasnya lebih kecil dibandingkan sebelum tahun 1999/2000. Semua ini disebabkan bukan karena pengaruh Undang-Undang Otonomi Daerah tetapi memang kondisi perekonomian secara makro mengalami keterpurukan disemua sektor. Dengan kondisi perekonomian yang demikian terpuruk, daya beli masyarakat secara umum sangat rendah sehingga hanya dapat memenuhi kebutuhan pokoknya saja. Hal ini menciptakan kondisi masyarakat untuk sementara tidak dapat menikmati atau memanfaatkan fasilitas hotel dan restoran.

2. Perbedaan antara Target dan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Empat Kecamatan Kota Bengkulu.

Dari Tabel 2 Perbedaan target dan penerimaan Pajak Hotel dan restoran di Kec. Gading Cempaka terlihat bahwa selama tahun anggaran 1992/1993 sampai dengan 2001/2002 perbedaan terbesar adalah pada tahun 1997/1998 sebesar - RP 73.189.222,5 dibandingkan dengan 3 kecamatan lain di kota Bengkulu. Salah estimasi ini disebabkan karena jatuhnya ekonomi Indonesia secara umum. Sehingga daya beli masyarakat merosot tajam dan lebih banyak mengutamakan kebutuhan pokoknya terlebih dulu. Untuk membayar sewa hotel dan makan di restoran, masyarakat lebih berhati-hati. Sedangkan kelebihan dari target terbesar juga ada di Kec. Gading Cempaka yaitu pada periode tahun 1993/1994, dibandingkan dengan 3 kecamatan lainnya. Yaitu sebesar + Rp. 16.522.668,- , karena pada periode tersebut kondisi ekonomi sedang stabil, perekonomian tumbuh cepat dan tingkat inflasi rendah. Kecamatan Teluk Segara kelebihan dari target terbesar pada tahun 1993/1994 (Rp.8.261.334) dan kekurangan dari target terbesar pada tahun 1997/1998 (Rp.36.594.611,2). Kecamatan Selebar kelebihan dari target terbesar pada tahun 1992/1993 (Rp.4.956.800,4) dan kekurangan dari target terbesar pada tahun 1997/1998 (Rp.21.956.766,7). Untuk kecamatan Muara Bangkahulu kelebihan dari target terbesar pada tahun 1992/1993 (Rp.3.304.533,6) dan kekurangan dari target terbesar pada tahun 1997/1998 (Rp.14.637.270).

Tabel 2. Perbedaan antara Target dan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di 4 kecamatan kota Bengkulu.

Tahun	Kec. Gading Cempaka	Kec.Teluk Segara	Kec. Selebar	Kec. Muara Bangkahulu
1992/1993	+ 89.438,5	+ 44.719,25	+ 26.831,5	+ 17.887,7
1993/1994	+ 16.522.668,-	+ 8.261.334,-	+ 4.956.800,4	+ 3.304.533,6
1994/1995	+ 9.997.445,-	+ 4.998.722,5	+ 2.999.233,5	+ 1.999.489,-
1995/1996	- 1.731.350,-	- 86.587,5	- 519.405	- 346.270,-
1996/1997	- 2.794.785,5	- 1.397.392,75	- 838.435,65	- 558.957,1
1997/1998	- 73.189.222,5	- 36.594.611,2	- 21.956.766,7	- 14.637.844,5
1998/1999	- 5.364.006,-	- 2.682.003,-	- 1.609.201,8	- 1.072.801,2
1999/2000	+ 2.129.443,5	+ 1.064.721,5	+ 638.833,-	+ 425.888,7
2000/2001	- 51.647.598,-	- 25.823.799,-	- 15.494.279,4	- 10.329.519,6
2001/2002	- 34.024.058,-	- 17.012.029,-	- 10.207.217,4	- 6.804.811,6

Dari keempat kecamatan yang paling rasional atau paling mendekati target adalah kecamatan Muara Bangkahulu. Alasan utama perbedaan dari keempat kecamatan tersebut secara umum hampir sama fluktuasi perbedaan antara penerimaan dengan targetnya, hal ini disebabkan karena masih dalam radius lokasi yang saling berdekatan (kota Bengkulu), sehingga perilaku produsen maupun konsumen Hotel dan Restoran tidak jauh berbeda.

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pajak Hotel dan Restoran

a. Faktor Pendukung

1. Penyuluhan Pajak
2. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 1998
3. Sistem Penagihan

b. Faktor Penghambat

1. Tingkat Hunian semakin menurun, karena tingginya biaya rekening listrik dan telepon serta

naiknya harga bahan kebutuhan pokok.

2. Kurangnya kesadaran wajib pajak (pengusaha hotel dan restoran) dalam membayar pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Restoran selama tahun anggaran penelitian yaitu dari tahun 1992/1993 – 2001/2002 relatif mengalami fluktuasi yang cukup berarti. Tahun pencapaian tingkat efektivitas yang tinggi adalah tahun 1992/93, 1993/94, 1994/95, dan 1999/2000. Dari sini dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 10 tahun hanya selama 4 tahun/periode penerimaan pajak Hotel dan Restoran mencapai tingkat efektivitas yang tinggi. Untuk meningkatkan penerimaan pajak Hotel dan Restoran yang perlu diperhatikan adalah;

1. Sanksi tidak hanya teguran dan tertulis, tetapi bisa berupa denda yang sesuai dengan Perda.
2. selain penyuluhan perlu juga dipasang papan himbauan di tempat-tempat yang strategis.
3. Koordinasi yang kuat antara Dipende, Kepala Wilayah dan wajib pajak.
4. Memperhitungkan potensi dan pertumbuhan wajib pajak sehingga target lebih realistis.
5. Petugas terjun langsung di lapangan dalam menentukan secara benar dan jujur jumlah pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak.

Aspek dalam persoalan Pemba -
ngunan daerah.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1991.
Pengantar Administrasi Pemba -
ngunan. LP3ES, Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2000.
Bengkulu dalam Angka. Jakarta
- Dinas Pendapatan Daerah, 1998.
Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Bengkulu,
Bengkulu
- Mankoesebroto, Guritno. 1991.
Ekonomi Publik, BPFE UGM,
Yogyakarta
- Pemerintah Daerah Bengkulu, 1999.
Undang-undang Otonomi Daerah,
Bintang Cemerlang.
- Riwu Kaho Josef, 1995. Prospek
Otonomi Daerah di Negara RI,
Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Rochmat 1994. dasar-
dasar Hukum Pajak Pendapatan.
Jakarta: PT Eresco.
- Sukirno Sadono, 1995. Beberapa